



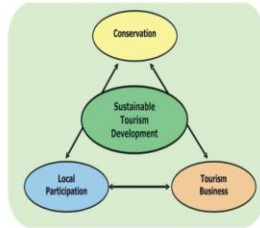
Reformasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dalam Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Hidup di Kawasan Gunung Lawu

Ismi D. A. Nurhaeni (0025086104), Rara Sugiarti (0030056306) dan Rino A. Nugroho (0003058003)
email: ismidwiastuti@staff.uns.ac.id

Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan hidup
2. Mengidentifikasi isu-isu strategis pemberdayaan perempuan dalam pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan hidup
3. Mengevaluasi model reformasi kebijakan pemberdayaan perempuan dalam pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan hidup

Gambar 1: Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan.



Sumber: Diadaptasikan dari Clements (2007).

Luaran Penelitian

1. Publikasi submitted pada Policy Research Journal, URL: <http://mc.manuscriptcentral.com/jpritle>
2. Visiting Lecturer pada Warren Wilson College, North Carolina-The United State of America.
3. Buku "Reformasi Administrasi Publik".
4. Buku "Panduan Reformasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dalam Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Hidup"
5. Policy Brief "Engendering Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan"
6. Policy Brief "Keterlibatan Perempuan Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan"

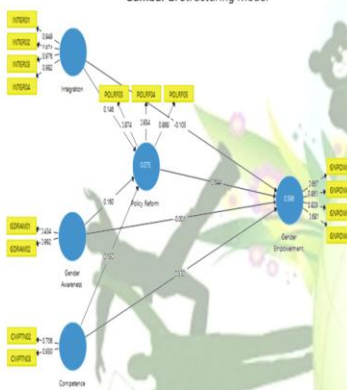
Metode Penelitian

1. Lokasi: Kawasan Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar, Indonesia.
2. Jenis Penelitian: penelitian permodelan dengan pendekatan kuantitatif.
3. Pengumpulan data: metode survey
4. Pengambilan sampel: convenience sampling.
5. Analisis data: Structural Equation Modelling.

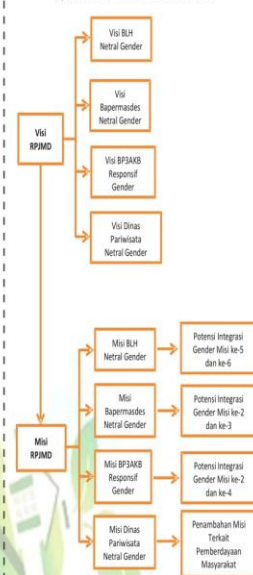
Temuan Penelitian

1. Keterlibatan perempuan dalam pembangunan pariwisata belum optimal.
2. Kebijakan yang ada belum memihak pada optimalisasi pemberdayaan perempuan.
3. Isu-isu strategis pemberdayaan perempuan mencakup:
 - 3.1. Belum ada sinkronisasi dan operasionalisasi antara kebijakan makro daerah terkait gender pada RPJMD dengan kebijakan renstra dan renja SKPD yang berkaitan;
 - 3.2. Stakeholder belum memiliki sensitivitas gender;
 - 3.3. Lemahnya peran kelembagaan struktural dan fungsional PUG;
 - 3.4. Representasi perempuan pada kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) tidak ada;
 - 3.5. Belum ada tindakan affirmative action pada layanan pembangunan pariwisata yang responsif terhadap perbedaan kebutuhan perempuan dan laki-laki
4. Kompetensi mempengaruhi pemberdayaan perempuan;
5. Dukungan pemerintah, legislatif dan pelaku turisme mempengaruhi pemberdayaan perempuan;
6. Integrasi gender di semua level dokumen kebijakan terbukti secara statistik valid dan reliabel untuk mengukur variabel integrasi gender.

Gambar 2: Structuring Model



Gambar 3: Konsistensi, Sinkronisasi dan Operasionalisasi Visi dan Misi Daerah dan SKPD



Pusat Penelitian dan Pengembangan Gender (P3G)
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Sebelas Maret, 2016